

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan :			
1	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	74
	Sasaran :			
2	Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Nilai	3,40

Kebumen, 26 Agustus 2024

Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Amin Rahmanurrasjid, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19720723 199803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KHUSUS
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan oleh APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1 Laporan
a	Meningkatnya Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu	33 Laporan
a	Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	2 Laporan
b	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	31 Laporan

Kebumen, 26 Agustus 2024

Inspektur Pembantu Bidang Khusus
Inspektorat Daerah



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Hanna Widyawati, S.T., M.T
Pembina – IV/a
NIP. 197802262009032003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG REFORMASI BIROKRASI
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Nilai persepsi korupsi	3.45
2.	Bertambahnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Jumlah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	5 Rekomendasi
a	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang di susun	5 Rekomendasi
3.	Meningkatnya pendampingan dan asistensi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi	52 Perangkat Daerah
a	Terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	52 Perangkat Daerah
b	Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	13 Perangkat Daerah
c	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	8 Kegiatan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

d	Terlaksananya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	3 Perangkat Daerah
---	--	---	--------------------

Kebumen, 26 Agustus 2024

Inspektur Pembantu Bidang Reformasi Biokrasi
pada Inspektorat



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Purbo Waskitho, S.E.
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197509242002121003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KASUBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	55 Orang
2.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	52 Dokumen
3.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang
4.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang disediakan	1 Paket
5.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket
6.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barag Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket
7.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturannn Perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen
8.	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket
9.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan
10.	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen
11.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

12.	Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
13.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan
14.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit
15.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit

Kebumen, 26 Agustus 2024

Kepala Sub Bagian Administrasi
Umum dan Keuangan



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Nur Utami, S.Pd
Penata Tk.I – III / d
NIP. 196708172009012004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KEPALA SUB BAGIAN ANALIS DAN EVALUASI
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen

Kebumen, 26 Agustus 2024

Kepala Sub Bagian Analis Dan Evaluasi
Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Beni Setiawan, S.Kom, M.M
Penata Tk I – III/d
NIP. 19800052006041012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIS PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Perencanaan, Evaluasi, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
2.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen

Kebumen, 26 Agustus 2024

Sekertaris Inspektorat Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Kus Haryati, S.Si., M.T
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197401181998032006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arumbinang No.16 Kebumen, Kode Pos 54311

Telepon: (0287) 381437, 381319 Faksimile (0287) 381319

Laman <https://inspektorat.kebumenkab.go.id> Pos-el: inspektoratkabkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Yunaningsih, SE
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Amin Rahmanurrasjid, S.H.,M.H.
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Amin Rahmanurrasjid, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 1972072319988031006



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Dwi Yunaningsih, SE
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 197712281997032004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Oleh APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3				Level 3
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	46 Paket	46 Paket	14	18	6	8
a	Meningkatnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	46 Paket	46 Paket	14	18	6	8
		Jumlah Obrik Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	145 Obrik	145 Obrik	36	26	73	10
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	64 Laporan	64 Laporan	23	26	5	10
3	Tersusunnya Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	1			1



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 90.102.000,-	Rp. 90.102.000,-	APBD
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 9.260.000,-	Rp. 9.260.000,-	APBD

Kebumen, 26 Agustus 2024

Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen

Inspektur Pembantu Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan Badan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Amin Rahmanurrasjid, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 1972072319988031006

Dwi Yunaningsih, SE
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 197712281997032004

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Oleh APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	8 Laporan
a	Meningkatnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan
3.	Tersusunnya Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Peurmusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2 Rekomendasi

Kebumen, 26 Agustus 2024

Inspektur Pembantu Bidang Kinerja Perangkat
Daerah dan Badan



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Dwi Yunaningsih, SE
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 197712281997032004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arumbinang No.16 Kebumen, Kode Pos 54311

Telepon: (0287) 381437, 381319 Faksimile (0287) 381319

Laman <https://inspektorat.kebumenkab.go.id> Pos-el: inspektoratkabkebumen@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Sayfudin, SH.

Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Desa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Amin Rahmanurrasjid, S.H.,M.H

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Amin Rahmanurrasjid, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 197207231998031006



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Ibnu Sayfudin, SH.
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197109041998031015



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN
RAKYAT DAN DESA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Oleh APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3				Level 3
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	85 Obrik	85 Obrik	17	31	17	25
a	Meningkatnya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	5 Kali	5 Kali	4	1		
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja	5 Laporan	5 Laporan	4	1		
b	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Pengawasan Desa	80 Desa	80 Desa	9	29	17	25
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	80 Laporan	80 Laporan	9	29	17	25



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Pengawasan Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Rp. 287.218.000,-	Rp. 287.218.000,-	
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Rp. 48.181.000,-	Rp. 48.181.000,-	

Kebumen, 26 Agustus 2024

Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen

Inspektur Pembantu Bidang
Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat
dan Desa



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Amin Rahmanurrasjid, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 196807221999031001

Ibnu Sayfudin, SH.
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197109041998031015

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN
RAKYAT DAN DESA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Oleh APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	75 Laporan
a	Meningkatnya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja	5 Laporan
b	Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	70 Laporan

Kebumen, 26 Agustus 2024

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan,
Kesejahteraan Rakyat dan Desa



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Ibnu Sayfudin, SH.
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 197109041998031015



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG AKUNTABILITAS
KEUANGAN DAERAH
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Oleh APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	61 Laporan
a	Meningkatnya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24 Laporan
b	Meningkatnya Pengawasan Reviu Atas Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan

Kebumen, 26 Agustus 2024

Inspektur Pembantu Bidang Akuntabilitas
Keuangan Daerah



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Agus Rianto, S.E., M.Si
Pembina Tk I – IV/b
NIP. 196712221994031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PERENCANA AHLI MUDA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
2.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan

Kebumen, 26 Agustus 2024

Perencana Ahli Muda Pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen



Eti Rokhyatun, S.T
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198110152010012002



RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2025



inspektoratkabkebumen@gmail.com

inspektorat.kebumenkab.go.id





SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah kemudian dapat dijadikan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Juli 2024
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Buku ini berisi prioritas program dan kegiatan Inspektorat yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan rencana kerja ini seluruh pemangku kepentingan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tentu saja buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan kami harapkan guna perbaikan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah di tahun yang akan datang.

Semoga buku rencana kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 11 Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



AMIN RAHMANURBASJID, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720723 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJAINSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023.....	8
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.....	8
B. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.....	30
C. Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat Daerah Tahun 2023.....	37
D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah.....	40
E. Review Usulan Program dan Kegiatan.....	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.....	57
A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	57
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025.....	60
C. Program dan Kegiatan.....	62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.....	65
BAB V PENUTUP.....	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	8
Tabel 2.2 Tabel T-C.29 Evaluasi Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Tahun 2024.....	11
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.....	31
Tabel 2.4 Capaian Program Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.....	32
Tabel 2.5 Hasil Evaluasi Komponen Nilai SAKIP.....	33
Tabel 2.6 Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2023.....	34
Tabel 2.7 Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2023.....	36
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2023.....	37
Tabel 2.9 Perbandingan Antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Hasil Kebutuhan.....	46
Tabel 2.10 Daftar Perbedaan Target Kinerja Dan Pagu Anggaran Antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Hasil Kebutuhan.....	55
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran.....	61
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama.....	61
Tabel 3.3 Program dan Kegiatan yang Terfokus Pada Kawasan Tertentu.....	63
Tabel 3.4 Program dan Kegiatan Yang Tersebar Ke Berbagai Kawasan.....	64
Tabel 4.1 Kerangka Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen....	65
Tabel 4.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk memanfaatkan potensi yang tersedia, mencari solusi permasalahan yang ada serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cakupan perencanaan pembangunan harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik dokumen perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk menyusun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan dalam program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 antara lain :

1. Substansi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen sama dengan materi Rancangan Renja Awal Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD 2025.
2. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan total dana yang diperlukan kegiatan.
3. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
4. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen merupakan dokumen yang berisi program dan kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Perangkat Daerah sebagai salah satu *stakeholder* kunci di daerah, perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan kinerja untuk Tahun 2025;

2. Tujuan

- a. Agar dapat mengalokasikan anggaran yang efektif dan efisien berdasarkan pagu indikatif;
- b. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

- c. Menyelaraskan program dan kegiatan dengan tujuan Nasional dan Provinsi;
- d. Menyelaraskan prioritas program dan kegiatan dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023.

Memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023, Capaian Renstra Perangkat Daerah dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Memuat telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025, serta program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Memuat rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

BAB V PENUTUP.

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah Pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023 dan capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan, yaitu Tahun 2024. Evaluasi ini penting karena untuk membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat Daerah sampai dengan tahun berjalan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran diperlukan pendanaan sesuai peruntukannya. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 menggunakan 3 Program.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)
	INSPEKTORAT DAERAH	10.467.450.000
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.576.542.000
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.000.000
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.682.504.000
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.668.504.000
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.000.000

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.000.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000
c	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	9.000.000
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
e	Penyediaan Bahan/Material	16.000.000
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.169.000
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000
b	Pengadaan Mebel	40.000.000
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.169.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.038.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.000.000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.038.000
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	296.831.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.831.000
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	65.000.000
d	Pemeliharaan Mebel	12.000.000
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.216.908.000
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.012.560.000
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100.000.000

No	Uraian	Anggaran (Rp)
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	208.500.000
c	Reviu Laporan Kinerja	71.000.000
d	Reviu Laporan Keuangan	81.000.000
e	Pengawasan Desa	448.400.000
f	Kerjasama Pengawasan Internal	41.660.000
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	62.000.000
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	204.348.000
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	61.600.000
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	142.748.000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	674.000.000
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	27.000.000
a	Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan	14.000.000
b	Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Pengawasan	13.000.000
3.2	Pendampingan dan Asistensi	647.000.000
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000
b	Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	185.000.000
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	235.000.000
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	169.000.000

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagaimana Tabel T-C.29 berikut;

Tabel 2.2 : Tabel T-C.29
EVALUASI RENJA TA 2023 DAN PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	500	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	60
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	50	Dokumen	9	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100	9	Dokumen	28	Dokumen	56
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	30	Dokumen	5	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100	5	Dokumen	16	Dokumen	53
		-Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	Dokumen	5	Laporan	6	Dokumen	6	Dokumen	100	5	Dokumen	16	Dokumen	53
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	20	Dokumen	4	Kali	4	Dokumen	4	Kali	100	4	Dokumen	12	Dokumen	6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Target Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Ting kat Real isasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Ting kat Real isasi (%)	Target Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/ 6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/ 4)
		-Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Lapor an	4	Lapo ran	4	Lapor an	4	Lapor an	100	4	Lapor an	12	Lapor an	60
6.01. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	60	Bulan	12	Bu lan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	60
6.01.0 1.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	50	Orang	51	Ora ng	53	Orang	53	Orang	100	52	Orang	52	Orang	104
		-Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50	Orang	51	Ora ng	53	Orang	53	Orang	100	52	Orang	52	Orang	104
6.01.0 1.2.02 .0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian Verifikasi keuangan SKPD	55	Bulan	12	Bu lan	12	Bulan	12	Bulan	109	12	Bulan	36	Bulan	65
		-Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	329	Doku men	75	Doku men	75	Doku men	75	Doku men	75	75	Doku men	225	Doku men	68

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	50	Orang	51	Orang	51	Orang	51	Orang	100	51	Orang	51	Orang	100
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50	Orang	51	Orang	51	Orang	51	Orang	100	51	Orang	51	Orang	100
		-Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	50	Orang	51	Orang	51	Orang	51	Orang	100	51	Orang	51	Orang	100
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	60
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	25	Jenis	5	Bulan	5	Jenis	5	Jenis	100	5	Jenis	15	Jenis	60
		-Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Bangunan Kantor Yang di Sediakan														
6.01.0 1.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	60
		-Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100	12	Paket	36	Paket	60
6.01.0 1.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	60
		-Jumlah paket barang cetak dan pengadaan	10	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	100	2	Paket	6	Paket	60
6.01.0 1.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	60
		-Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-	71	Dokumen	28	Dokumen	28	Dokumen	28	Dokumen	100	5	Dokumen	61	Dokumen	56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		undangan														
6.01.0 1.2.06 .0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	60
		-Jumlah paket bahan/material yang disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	3	Paket	5	Paket	100
6.01.0 1.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	60
		-Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	92	Laporan	20	Laporan	20	Laporan	20	Laporan	100	12	Laporan	52	Laporan	56
6.01.0 1.2.06 .0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Penatausahaan Arsip Dinamis pada	27	Set	3	-	6	Set	6	Set	100	3	Set	12	Set	44

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Satuan Kerja Perangkat Daerah														
		-Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4	doku men	3	doku men	4	Doku men	4	Doku men	100	3	Doku men	10	Doku men	250
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	253	Unit	2	Unit	14	Unit	14	Unit	100	92	Unit	108	Unit	42
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	197	Unit	-	Unit	4	Unit	4	Unit	100	66	Unit	70	Unit	35,5
		-Jumlah paket mebel yang di sediakan	197	Unit	-	unit	4	Unit	4	Unit	100	66	Unit	70	Unit	35,5
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	43	Unit	-	Unit	9	Unit	9	Unit	100	22	Unit	31	Unit	72
		-Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang	43	Unit	-	Unit	9	Unit	9	Unit	100	22	Unit	31	Unit	72

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		disediakan														
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	13	Unit	2	Unit	1	Unit	1	Unit	100	4	Unit	7	Unit	54
		-Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	13	Unit	2	Unit	1	Unit	1	Unit	100	4	Unit	7	Unit	54
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	60
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	60
		-Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
6.01.0 1.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	60
		-Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	60
6.01.0 1.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Bulan	12	Laporan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	Bulan	60
		-Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	62	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	14	Laporan	38	Laporan	24

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	348	Unit	56	Unit	65	Unit	65	Unit	100	76	Unit	197	Unit	57
126.0 1.01.2 .09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	166	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit	100	24	Unit	72	Unit	43
		-Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	166	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit	100	24	Unit	72	Unit	43
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	254	Unit	30	Unit	30	Unit	30	Unit	100	52	Unit	112	Unit	44
		-Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	254	Unit	30	Unit	30	Unit	30	Unit	100	52	Unit	112	Unit	44

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
6.01.0 1.2.09 .0005	Pemeliharaan Meubel	Jumlah unit pemeliharaan Meubel	20	Unit	-	Unit	20	Unit	20	Unit	100	-	-	20	Unit	100
		-Jumlah Meubel yang dipelihara	20	Unit	-	Unit	20	Unit	20	Unit	100	-	-	20	Unit	100
6.01.0 1.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	-	1	-	1	Unit	1	Unit	100	-	-	2	Unit	100
		-Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	-	1	-	1	Unit	1	Unit	100	-	-	2	Unit	100
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Kapabilitas APIP	3	Level	3	Level	3	Level	3	level	100	3	Level	3	Level	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah penyelenggaraan pengawasan internal	488	Laporan	71	Laporan	177	Laporan	552	Laporan	311	115	Laporan	738	Laporan	151
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40	OPD/BU MD	8	OPD/BU MD	6	OPD/BU MD	23	OPD/BUM D	383	6	OPD/BU MD	37	OPD/BU MD	93
		-Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah daerah	40	Laporan	8	Laporan	6	Laporan	23	Laporan	383	6	Laporan	37	Laporan	93
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	850	Paket	41	Paket	100	Paket	100	Paket	100	50	Paket	256	Paket	30
		-Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	10	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	20	Laporan	24	Laporan	240
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	2552	Kali OPD	530	Kali OPD	5	Kali OPD	5	Kali OPD	100	5	Kali	15	Kali	60
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	25	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100	5	Laporan	15	Laporan	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
6.01.0 2.2.01 .0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	28 52	Kali OPD	28 78	Kali OPD	5	Kali OPD	131	Obrik	134	5	Kali	164	Kali	585
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	28	Laporan	28	Laporan	5	Laporan	94	Laporan	196	5	Laporan	127	Laporan	453
6.01.0 2.2.01 .0005	Pengawasan Desa	Jumlah Pengawasan Desa	360	Desa	14	Desa	154	Desa	423	Desa	275	80	Desa	517	Desa	143
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	360	Laporan	14	Laporan	154	Laporan	423	Laporan	275	80	Laporan	517	Laporan	143
6.01.0 2.2.01 .0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal	21	Kali	1	Kali	5	Kali	5	kali	100	5	Kali	15	Kali	71
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Kesepakatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100	1	Kesepakatan	3	Kesepakatan	60
6.01.0 2.2.01 .0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	482	Obrik	52	Obrik	48	Obrik	48	Obrik	100	32	Obrik	215	Obrik	45

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			4	5	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	10=(5+7+9)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak	20	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	4	Dokumen	12	Dokumen	60
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	417	Laporan	60	Laporan	33	Laporan	88	Laporan	267	24	Laporan	172	Laporan	41
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan penyelesaian kerugian Negara yang diselesaikan	100	Kasus	5	Kasus	3	Kasus	3	Kasus	100	4	Kasus	12	Kasus	12
		-Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	100	Laporan	5	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100	4	Laporan	12	Laporan	12
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	317	Obrik	55	Obrik	30	Obrik	85	Obrik	100	20	Obrik	160	Obrik	50
		-Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	317	Laporan	55	Laporan	30	Laporan	85	Obrik	283	20	Laporan	160	Laporan	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai persepsi anti korupsi	3.5	Nilai	3,74	Nilai	3.40	Nilai	3,90	Nilai	115	3,45	Nilai	3,90	Nilai	112
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	28	Dokumen	5	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100	7	Dokumen	19	Dokumen	68
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan	11	Dokumen	3	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	7	Dokumen	64
		-Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang pengawasan yang disusun	11	Rekomendasi	3	Rekomendasi	2	Rekomendasi	2	Rekomendasi	100	7	Rekomendasi	14	Rekomendasi	127
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	22	Dokumen	2	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100	7	Dokumen	12	Dokumen	55

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		-Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	22	Rekomendasi	2	Rekomendasi	5	Rekomendasi	5	Dokumen	100	5	Rekomendasi	12	Rekomendasi	55
6.01.03.2.02	Pedampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi	52	OPD	26	OPD	50	OPD	52	OPD	52	52	OPD	52	OPD	100
6.01.03.2.02.0001	Pedampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pendampingan dan Asistensi Pemerintah Daerah	52	OPD	24	OPD	50	OPD	52	OPD	52	52	OPD	52	OPD	100
		-Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	52	OPD	24	OPD	50	OPD	52	OPD	52	52	PD	52	PD	100
06.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	52	OPD	24	OPD	50	OPD	13	OPD	26	52	OPD	52	OPD	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		-Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	52	PD	24	PD	50	PD	13	PD	26	52	PD	52	PD	100
6.01.0 3.2.02 .0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	40	Kegiatan	8	Kegiatan	8	Kegiatan	8	Kegiatan	100	8	Kegiatan	24	Kegiatan	60
		-Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	40	Kegiatan	8	Kegiatan	8	Kegiatan	8	Kegiatan	100	8	Kegiatan	24	Kegiatan	60
6.01.0 3.2.02 .0004	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	52	OPD	24	OPD	15	OPD	24	OPD	160	3	OPD	27	OPD	52

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)		
		-Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	52	PD	24	PD	15	PD	24	OPD	160	3	PD	27	PD	52

Berdasarkan Tabel 2.2 hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja program yaitu cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100% realisasi 100%.

Program penunjang terdiri dari 7 kegiatan. Dari 7 kegiatan tersebut rata - rata capaian kinerjanya adalah 100%.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, capaian kinerja program yaitu nilai leveling APIP target level 3 dan terealisasi Level 3, sehingga capaiannya 100%.

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

- Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, adalah jumlah penyelenggaraan pengawasan internal dengan target 177 laporan dan terealisasi 552 laporan, sehingga capaiannya 311%. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal antara lain audit kinerja, pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada puskesmas dan kecamatan, penilaian pelayanan publik pada 21 perangkat daerah, monitoring dan evaluasi hibah bunga pada BUMD, pengecekan pekerjaan pengadaan langsung pada pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang tahun 2022, evaluasi SAKIP perangkat daerah, reviu LPPD, reviu LKJIP, reviu LKPD, reviu RKPD, pemeriksaan kas opname, reviu DAK, reviu BLUD, reviu RKPD, pemeriksaan BOS, reviu SSH, reviu hibah bantuan sosial, pemeriksaan APBD Desa, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- Capaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu adalah jumlah penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dengan target 33 laporan dan terealisasi 88 laporan sehingga capaiannya 267%. Kegiatan berupa penanganan penyelesaian kerugian negara, penanganan aduan, probity audit, reviu HPS.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, capaian kinerja program indeks persepsi korupsi dengan target 3,40 adapun realisasi adalah 3,90, sehingga capaiannya 115%.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 kegiatan, yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Capaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan target 7 dokumen terealisasi 7 dokumen sehingga capaiannya 100%. Dokumen yang tersusun, yaitu:

- Keputusan Bupati Kebumen Nomor 100.1.2/526 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700/426 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Kebumen Nomor 100.1.2/535 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kebumen;
- Surat Edaran Bupati tentang LHKAN;
- Keputusan Bupati Kebumen tentang Desa Anti Korupsi
- Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen tentang admin program pengendalian gratifikasi.
- Keputusan Inspektur Kabupaten Kebumen tentang Tim Zona Integritas.

Capaian Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan target 52 OPD terealisasi 52 OPD, sehingga capaiannya 100%. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan antara lain:

- Pendampingan kepada seluruh perangkat daerah dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Pendampingan tematik reformasi birokrasi yaitu; tema kemiskinan, investasi, stunting, penggunaan komponen dalam negeri, dan pengendalian inflasi.
- *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Korsupgah, bimtek/sosialisasi anti korupsi, pengendalian gratifikasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN), monitoring implementasi

pendidikan anti korupsi, monitoring MCP triwulan I sampai triwulan IV, monitoring PPG, monitoring desa anti korupsi, sosialisasi pedoman MCP, fasilitasi penyusunan rencana aksi pemenuhan dokumen MCP.

- Asistensi/ pendampingan zona integritas, sosialisasi pengisian LKE zona integritas Tahun 2023, reviu penilaian mandiri pembangunan zona integritas. Kegiatan pendampingan/sosialisasi dan penancangan Zona Integritas (ZI) telah dilaksanakan pada 24 Perangkat Daerah, 3 Puskesmas dan RSUD dr. Soedirman.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah periode Tahun 2021 – 2026. Adapun indikator-indikator yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen selama Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

a. Nilai SAKIP

Capaian indikator nilai SAKIP ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui evaluasi SAKIP.

b. Tingkat Maturitas SPIP;

Capaian tingkat maturitas SPIP ditentukan berdasarkan hasil evaluasi BPKP dan Penjaminan Kualitas oleh APIP

c. Nilai Leveling APIP;

Nilai Leveling APIP ditentukan dari Evaluasi BPKP.

d. Nilai Persepsi Korupsi.

Nilai Persepsi Korupsi dihasilkan dari Survey Penilaian Integritas Yang dilaksanakan oleh KPK

Berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menggunakan Maturitas SPIP sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Adapun capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan 2.4

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024(thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP		Nilai SAKIP	69	71	74	77	66,11	71*	-	-	Tidak tercapai
2	Tingkat Maturitas SPIP		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,20	3,30	3,40	3.50	3,19	3.30*	-	-	Tidak tercapai
3	Nilai Leveling APIP		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3	3*	-	-	Tercapai
4	Nilai Persepsi Korupsi		Nilai Persepsi Korupsi	3,40	3,45	3,50	3.50	3,90	3.90*	-	-	Tercapai

Tabel 2.4
Capaian Program Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

No	Urusan pemerintahan dan program	Indikator	Target tahun ke-		Realisasi tahun ke-		Ket
			2023	2024	2023	2024*	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	Tercapai
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Persepsi Korupsi	3.40	3.45	3.90	3.90*	Tercapai

*pencapaian tahun 2024 menggunakan asumsi

Berdasarkan Tabel 2.3 dan 2.4 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP merupakan indikator tujuan Perangkat Daerah, dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No.B/324/AA.05/2023 tanggal 27 Nopember 2023 Hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, nilai SAKIP Kabupaten Kebumen adalah 66,11 dari target 69 sehingga capaiannya adalah 95,81%. Nilai 66,11 masuk dalam predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Hasil evaluasi komponen yang dinilai adalah sebagaimana Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5

Hasil Evaluasi Komponen Nilai SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,90
2	Pengukuran Kinerja	30	20.82
3	Pelaporan Kinerja	15	9.94
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,45
	Nilai Hasil Evaluasi	100	66.11
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

b. Tingkat Maturitas SPIP

Maturitas SPIP merupakan indikator kinerja urusan pengawasan. Berdasarkan Laporan Kepala Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta No.PE.09.03/LHP-598/PW12/3/2023 tanggal 29 Desember 2023 Hal : Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen, nilai maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Kebumen terealisasi 3,19 dari target 3,20 sehingga capaian kinerjanya 99,69% atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi). Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP

Terintegrasi Kabupaten Kebumen diuraikan sebagaimana tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
 Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
 Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Penilaian per Komponen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi		Naik/turun Nilai Komponen
		Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	
	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi		4,033		3,191	-0,842
1	Penetapan tujuan	5,000	2,000	3,500	1,400	-0,600
2	Struktur dan Proses	3,244	0,973	2,919	0,876	-0,097
3	Pencapaian Tujuan	4,500	1,350	3,050	0,915	-0,435

Adapun hasil evaluasi BPKP atas Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan

- Sasaran strategis perangkat daerah belum mendukung sasaran strategis Pemda, antara lain sasaran strategis perangkat daerah “Terkelolanya Energi Baru Terbarukan” belum mendukung sasaran strategis Pemda “Berkurangnya Pengangguran”. Sasaran tersebut belum berorientasi hasil karena belum berdampak langsung pada gurita berkurangnya pengangguran.
- Indikator sasaran strategis Pemda belum cukup untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis pemda, antara lain sasaran strategis Pemda “Berkurangnya Penduduk Miskin” dengan indikator tingkat kemiskinan, belum memasukan indikator pendidikan, kesehatan, tingkat inflasi, dan peningkatan pendapatan. Hal ini karena dalam menetapkan indikator belum mempertimbangkan seluruh aspek yang mendukung ketercapaian sasaran strategis yang ditetapkan.
- Indikator sasaran strategis perangkat daerah belum memperhatikan realisasi tahun sebelumnya, antara lain sasaran strategis perangkat daerah “Meningkatnya Ketahanan Pangan” dengan indikator “ Persentase Kenaikan

Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan” dengan target tahun 2023 sebesar 3%, sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 5,62%. Hal ini karena evaluasi atas target tahunan dalam RPJMD 2021-2026 baru dilakukan saat ini (sedang berproses).

2. Struktur dan Proses

- Belum seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi atas kebijakan, implementasi, dan hasil serta efektifitas tindak lanjut secara berkala, konsisten dan terdokumentasi untuk menangani residual risk sebagai tindak lanjut perbaikan kinerja. Hal ini karena kegiatan evaluasi SPIP Terintegrasi belum merupakan prioritas Perangkat Daerah.
- Target kinerja SPIP Terintegrasi ditetapkan menjadi indikator kinerja Inspektorat Daerah yang seharusnya menjadi indikator Pemda (Setda). Hal ini karena kesalahan dalam menetapkan penanggungjawab IKU
- APIP telah memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi namun perlu mengembangkan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada level sasaran strategis Pemerintah Daerah.

3. Pencapaian Tujuan

- Masih terdapat temuan berulang dalam LHP BPK berupa kekurangan volume pekerjaan dalam 3 tahun terakhir.
- Jumlah temuan pada LHP BPK atas LKPD pada 5 tahun terakhir masih di atas 10, dengan rincian temuan tahun 2018 sebanyak 29 temuan, tahun 2019 sebanyak 15 temuan, tahun 2020 sebanyak 7 temuan, tahun 2021 sebanyak 12 temuan, dan tahun 2022 sebanyak 16 temuan.

c. Nilai Leveling APIP

Level Kapabilitas APIP merupakan indikator kinerja program penyelenggaraan pengawasan dan indikator kinerja kunci (IKK) Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : PE.09.03/LHP-439/PW12/6/2023 tanggal 30 November 2023 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kebumen, bahwa Inspektorat

Kabupaten Kebumen telah memenuhi karakteristik Kapabilitas APIP Level 3 (**Delivered**) dengan skor 3,18.

Rincian hasil evaluasi penilaian mandiri kapabilitas APIP sebagaimana tabel 2.7

Tabel 2.7

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1	Pengelolaan SDM	0,63	3	0,54	3
2	Praktik Profesional	0,72	4	0,54	3
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,24	4	0,24	4
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,18	3	0,18	3
5	Struktur Tata Kelola	0,48	4	0,48	4
6	Peran dan Layanan	1,40	3	1,20	3
Simpulan		3,65	3	3,18	3

Penilaian kapabilitas APIP Level 3 (*Delivered*) ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kebumen telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik professional, serta hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Kebumen cukup berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Efisien, Efektif, Ekonomis) peringatan dini dan peningkatan efektivitas Manajemen Resiko (MR), serta perbaikan tata kelola bagi Pemerintah Daerah.

d. Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi Korupsi merupakan indikator kinerja program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi. Nilai Persepsi Korupsi mengambil dari Survey Penilaian Integritas yang dilakukan oleh KPK. Berdasarkan hasil Survey Penilaian Integritas Tahun 2023, hasil survey penilaian integritas untuk Kabupaten Kebumen adalah 78,19. Nilai Survey Penilaian Integritas menggunakan skala 1 sampai 100. Sedangkan nilai

persepsi korupsi menggunakan skala 1 sampai 5, sehingga untuk mendapatkan nilai persepsi korupsi maka nilai survey penilaian integritas di konversi menjadi skala 1 sampai 5 yaitu nilai survey penilaian integritas dibagi 20. Dari hasil survey tersebut, maka capaian nilai persepsi korupsi adalah $(78,19/20) = 3,90$.

C. Capaian Kinerja Keuangan Inspektorat Daerah Tahun 2023

Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen TA 2023 sebesar Rp. 10.467.450.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 10.293.991.283 atau 94,34% Sedangkan untuk belanja modal Rp. 197.750.000,00 dan realisasi keuangan Rp.194.632.700,00 atau 98,42%. Dengan demikian dapat diartikan hampir semua rencana program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Data capaian kinerja keuangan tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Presentase (%)
A	Belanja Operasi	10.269.700.000	10.099.190.000	98,34
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.576.542.000	8.433.420.000	98,33
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.955.544	99,85
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.000.000	16.972.544	99,84
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	12.983.000	99,87
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.682.504.000	7.550.609.107	98,28
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.668.504.000	7.539.224.826	98,31
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.000.000	11.384.281	81,32
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000	69.832.279	99,76
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	70.000.000	69.832.279	99,76

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Presentase (%)
	dan Fungsi			
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.000.000	134.491.791	99,62
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.993.700	99,96
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	11.995.000	99,96
c	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	9.000.000	8.990.000	99,89
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.970.500	99,02
e	Penyediaan Bahan/Material	16.000.000	15.975.000	99,84
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	74.567.591	99,42
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000	100
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.419.000	2.419.000	100
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.038.000	156.210.850	96,4
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.993.300	99,67
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.000.000	106.249.001	94,87
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.038.000	47.968.549	99,86
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	296.831.000	295.269.646	99,47
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.831.000	194.439.246	99,8
b.	Pemeliharaan Mebel	12.000.000	11.970.000	99,75
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	24.915.400	99,66
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	65.000.000	63.945.000	98,38
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.216.908.000	1.192.932.811	98,03
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.012.560.000	995.095.435	98,28
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100.000.000	97.430.897	97,43
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	208.500.000	206.941.430	99,25
c	Reviu Laporan Kinerja	71.000.000	70.707.106	99,59
d	Reviu Laporan Keuangan	81.000.000	80.786.228	99,74
e	Pengawasan Desa	448.400.000	436.580.895	97,36
f	Kerjasama Pengawasan	41.660.000	41.070.600	98,59

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Presentase (%)
	Internal			
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	62.000.000	61.578.279	99,32
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	204.348.000	197.837.376	96,81
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	61.600.000	57.531.318	93,4
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	142.748.000	140.306.058	98,29
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	674.000.000	667.637.555	99,06
3.1	Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	27.000.000	26.836.188	99,39
a	Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan	14.000.000	13.851.088	98,94
b	Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitas Pengawasan	13.000.000	12.985.100	99,89
3.2	Pendampingan dan Asistensi	647.000.000	640.801.367	99,04
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	58.000.000	57.184.426	98,59
b	Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	185.000.000	182.551.848	98,68
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	235.000.000	233.283.239	99,27
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	169.000.000	167.781.854	99,28
II	Belanja Modal Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	197.750.000	194.632.700	95,5
a	Pengadaan Mebel	40.000.000	39.103.900	97,76
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.415.000	76.584.800	97,66
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.335.000	78.944.000	99,51
	Jumlah	10.467.450.000	10.293.991.283	98,34

Berdasarkan tabel diatas, dari 3 program yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, capaian keuangannya adalah 98,34%. Dari 38 sub kegiatan, 37 sub kegiatan realisasi keuangan diatas 90% dan 1

sub kegiatan di bawah 90%, yaitu sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan realisasi keuangan 81,32% hal ini dikarenakan adanya kesalahan pemilihan pagu honorarium pengelola barang dan honorarium pengelola keuangan yaitu pagu lebih besar dari honor yang seharusnya di bayarkan.

D.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

1) Tingkat Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Kebumen. Inspektorat Kabupaten Kebumen sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Adapun fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen meliputi:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) Pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan terutama untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu:

- a) Dukungan sebagian pimpinan/manajemen perangkat daerah terhadap pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai. Tanpa komitmen pimpinan, agenda yang telah ditetapkan akan sulit diinternalisasikan kepada seluruh pegawai. Saat ini masih banyak Kepala Perangkat Daerah yang berpendapat bahwa SPIP merupakan beban tugas tambahan dan formalitas, dan belum menjadi kebutuhan organisasi;
- b) Auditan/Perangkat Daerah tidak tertib dan tepat waktu dalam memenuhi dokumen untuk bahan audit;
- c) Dalam penanganan pengaduan masyarakat, perangkat daerah dan Aparat Penegak Hukum, APIP terkadang kesulitan dalam akses untuk memperoleh bukti dan terdapat keterbatasan kompetensi bidang teknis/aduan yang ditangani;
- d) Kualitas dan kuantitas SDM aparat pengawas belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangannya;
- e) Obyek pemeriksaan belum seluruhnya selesai menindaklanjuti hasil pengawasan eksternal dan internal;

- f) Proporsi anggaran untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen belum sesuai Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
- g) Sarana prasarana seperti laptop, kendaraan roda 4 masih kurang memadai.

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Terhadap permasalahan yang ada, dampak yang terjadi antara lain:

- a. Kasus/aduan belum tertangani 100%
- b. Kualitas hasil pemeriksaan belum optimal;
- c. Penerbitan laporan hasil pemeriksaan belum tepat waktu.

Dampak tersebut tentu berpengaruh terhadap kinerja pelayanan yang dilaksanakan dan tentunya sangat berpengaruh terhadap pencapaian visi misi Bupati Kebumen, dimana Inspektorat Daerah mendukung visi misi Bupati Kebumen yang pertama yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open gov. Dengan capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah tentu akan mendukung pencapaian visi misi Bupati Kebumen.

4) Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah.

Tantangan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan pelayanan Tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

- a) Cakupan pengawasan desa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa;
- b) Menyamakan persepsi dalam pengimplementasian tugas-tugas mandatory seperti Reformasi Birokrasi, SPIP, MCP, dan Zona Integritas;
- c) Lemahnya respon Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan dan mencukupi dokumen tugas-tugas mandatory;
- d) Adanya perubahan penilaian Reformasi Birokrasi menjadi Reformasi Birokrasi Tematik, maka perubahan tidak hanya sekedar pemenuhan dokumen tetapi harus ada kegiatan yang nyata dapat dinikmati oleh masyarakat;

- e) Penyelesaian audit keuangan dan pengawasan untuk peningkatan pendapatan;
- f) Terdapat beban tugas pengawasan yang diluar program kerja pengawasan yang sudah ditetapkan yang merupakan mandatory yang harus dilaksanakan baik dari kepala daerah maupun pemerintah pusat.
- g) Banyak perangkat daerah yang minta keterlibatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen mulai proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- h) Banyak Perangkat Daerah yang belum memenuhi standar pelayanan publik;
- i) Orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil;
- j) Lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan output kinerja perangkat daerah;
- k) Tata kelola perangkat daerah yang baik belum sepenuhnya diterapkan,
- l) Adanya kewajiban melaksanakan reuiu/audit IT implementasi *e-purchasing*.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

- a) Komitmen/Dukungan Kepala Daerah yang tercemin dalam RPJMD dan Internal Audit Charter (IAC);
- b) Kerjasama/koordinasi dengan BPKP Perwakilan DIY dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah terjalin dengan baik;
- c) Sudah ada kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Kepolisian Resor Kebumen, Kejaksaan Negeri Kebumen tentang Koordinasi APIP dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Dukungan anggaran;
- e) Dukungan sarana dan prasarana;
- f) Rencana penerapan pengawasan berbasis risiko.

5) Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025

- a) Penguatan peran Inspektorat Daerah agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis Daerah, melalui peningkatan kualitas SDM Pengawasan;
- b) Peningkatan Kapabilitas APIP dan penerapan manajemen risiko pada skala Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- c) Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bersih dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) menyeluruh ke seluruh perangkat daerah secara bertahap;
- d) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
- e) Pengawasan SPIP, Reformasi Birokrasi, MCP di perangkat daerah;
- f) Pengawasan desa anti korupsi;
- g) Pengawasan laporan keuangan pemerintah daerah;
- h) Pengawasan kinerja di perangkat daerah dan BUMD;
- i) Penanganan aduan dan probity audit;
- j) Kerjasama pengawasan internal (saber pungli).

E. Review Usulan Program dan Kegiatan

1) Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Program pada Inspektorat Daerah tetap berpedoman pada Rencana Strategis yang telah disusun khususnya pada pelaksanaan tahunan. Pada Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun program Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a) Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Program penyelenggaraan pengawasan terdiri dari 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan.

b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan.

Adapun perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9

Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		Maturitas SPIP	3,30	10.303.146.493	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Kab Kebu men	Maturitas SPIP	3,30	10.329.278.493	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					INSPEKTORA T DAERAH					
6.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Kebumen	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	8.911.146.493	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH	Kab. Kebu men	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	8.937.278.493	
6.01. 01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	45.118.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebu men	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	45.118.000	
6.01. 01.2. 01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	32.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Kebu men	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	32.000.000	
6.01. 01.2. 01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	13.118.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kebu men	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	13.118.000	

6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	8.197.528.493	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	8.197.528.493	
6.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kebumen	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/Bulan	8.183.528.493	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kebumen	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang/bulan	8.183.528.493	
6.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52 Dokumen	14.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	52 Dokumen	14.000.000	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 orang	50.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 orang	67.904.000	
6.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kebumen	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	50.000000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kebumen	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	67.904.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	149.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	149.500.000	
6.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000	

6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	9.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	9.000.000	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan yang disediakan	5 Dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan yang disediakan	5 Dokumen	3.500.000	
6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	16.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kebumen	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	16.000.000	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	90.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kebumen	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	90.000.000	
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4.000.000	
6.01.01.2.0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 unit	140.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 unit	140.000.000	

6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kab.Kebumen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	Kab.Kebumen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	20.000.000	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Kebumen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	80.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Kebumen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	80.000.000	
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Kebumen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	40.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Kebumen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	40.000.000	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	164.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	175.132.000	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	112.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	122.132.000	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kebumen	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	

6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58 Unit	165.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Kebumen	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58 Unit	162.096.000	
6.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kebumen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	140.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kebumen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	137.096.000	
6.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kebumen	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit	25.000.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Kebumen	Level Kapabilitas APIP	3	1.003.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Kebumen	Level Kapabilitas APIP	3	1.003.000.000	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Kebumen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	175 obrik	818.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Kebumen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	149 Laporan	818.000.000	
6.01.02.2.01.001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	90.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	90.000.000	

6.01.02.2.01.002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24 Laporan	210.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24 Laporan	210.000.000	
6.01.02.2.01.003	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Kebumen	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	50.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Kebumen	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	50.000.000	
6.01.02.2.01.004	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Kebumen	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan	60.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Kebumen	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan	60.000.000	
6.01.02.2.01.005	Pengawasan Desa	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	70 Laporan	250.000.000	Pengawasan Desa	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	70 Laporan	250.000.000	
6.01.02.2.01.006	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Kebumen	Jumlah Kesepakatan	1 Kesepakatan	98.000.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Kebumen	Jumlah Kesepakatan	1 Kesepakatan	98.000.000	
6.01.02.2.01.007	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	60.000.000	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	60.000.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kebumen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	33 obrik	185.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kebumen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	33 laporan	185.000.000	

6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	65.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	65.000.000	
6.01.02.2.02.002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	120.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kebumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	120.000.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Kebumen	Nilai Persepsi Korupsi	3.50	389.000.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Kebumen	Nilai Persepsi Korupsi	3.50	389.000.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Kebumen	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	5 Dokumen	26.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Kebumen	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	5 Dokumen	26.000.000	
6.01.03.2.01.001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Kebumen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang di susun	2 Rekomendasi	13.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Kebumen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang di susun	2 Rekomendasi	13.000.000	
6.01.03.2.01.002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Kebumen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	13.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Kebumen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	13.000.000	

6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Kebumen	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	24 Perangkat Daerah	363.000.000	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Kebumen	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	24 Perangkat Daerah	363.000.000	
6.01.03.2.02.001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	24 Perangkat daerah	53.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	24 Perangkat daerah	53.000.000	
6.01.03.2.02.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Kebumen	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	13 Perangkat Daerah	60.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Kebumen	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	13 Perangkat Daerah	60.000.000	
6.01.03.2.02.003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	180.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	180.000.000	
6.01.03.2.02.004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Kebumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7 Perangkat Daerah	70.000.000	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Kebumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7 Perangkat Daerah	70.000.000	

2) Penjelasan Mengenai Alasan Proses Rancangan Awal RKPD Dengan Analisis Hasil Kebutuhan.

Rancangan awal Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 007.2.5/178 Tahun 2024 tentang Jadwal pelaksanaan forum perangkat daerah Tahun 2025 dalam rangka penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah Tahun 2025. Berdasarkan surat edaran tersebut, pagu indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Rp. 10.303.146.493,00 terdiri dari ;

- a) Gaji ASN sebesar Rp. 4.170.365.495,00
- b) Tunjangan kinerja sebesar Rp. 4.013.163.000,00
- c) Belanja Operasional sebesar Rp. 2.104.618.000,00
- d) Belanja Prioritas sebesar Rp. 15.000.000,00

Kemudian berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 050.2.4/10883 Tahun 2024 tentang Penyusunan dan Pembagian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025, terdapat beberapa perbedaan dengan pagu awal yaitu pagu akhir Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menjadi Rp. 10.329.278.493,00, dengan rincian pagu sebagai berikut ;

- a) Gaji ASN sebesar Rp. 4.170.365.495,00
- b) Tunjangan kinerja sebesar Rp. 4.013.163.000,00
- c) Belanja Operasional sebesar Rp. 2.104.618.000,00
- d) Upah P2K sebesar Rp. 26.132.000,00
- e) Belanja Prioritas sebesar Rp. 15.000.000,00.

Dengan adanya Surat Edaran Bupati Nomor 050.2.4/10883 Tahun 2024 mengakibatkan beberapa sub kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengalami perubahan target kinerja dan pagu anggaran. Daftar perbedaan target kinerja dan pagu anggaran antara rancangan awal RKPD dengan analisis hasil kebutuhan sebagaimana Tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10

Daftar Perbedaan Target Kinerja dan Pagu Anggaran Antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Hasil Kebutuhan

No	Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Pagu Sesuai Surat Edaran Bupati No. 007.2.5/178 Tahun 2024 (Rancangan Awal)	Target Kinerja dan Pagu Sesuai Surat Edaran Nomor 050.2.4/10883 Tahun 2024 (Analisis Hasil Kebutuhan)
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 orang Rp. 50.000.000,00	4 orang Rp. 67.904.000,00
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan Rp.2.000.000,00	12 laporan Rp. 3.000.000,00
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan Rp. 112.000.000,00	12 laporan Rp. 112.132.000,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 unit Rp. 140.000.000,00	24 unit Rp. 137.096.000,00

2) Penjelasan Temuan-Temuan Setelah Proses Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 050.2.4/10883 Tahun 2024 tentang Penyusunan dan Pembagian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025 Inspektorat Daerah mendapatkan tambahan pagu anggaran Rp 26.132.000,00 yang diperuntukan untuk Upah P2K. Namun karena upah P2K sudah di anggarkan di sub kegiatan jasa pelayanan umum, maka terdapat penyesuaian peruntukan anggaran untuk kegiatan prioritas sebagai

berikut;

- a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dikarenakan kebutuhan peningkatan kompetensi jabatan fungsional auditor. Dengan adanya penambahan anggaran, yaitu semula Rp. 50.000.000,00 menjadi Rp. 67.904.000,00 sehingga target kinerja dari 3 orang menjadi 4 orang.
- b) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, kebutuhan pengiriman LHP ke auditan cukup banyak berdasarkan evaluasi anggaran tahun 2023 tidak mencukupi, sehingga dari semula Rp. 2.000.000,00 menjadi Rp. 3.000.000,00
- c) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Berdasarkan evaluasi, terdapat kekurangan anggaran. Sehingga dilakukan penambahan anggaran dari semula Rp 112.000.000,00 menjadi Rp 112.132.000,00.
- d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Terdapat pengurangan anggaran dari semula Rp 140.000.000,00 menjadi Rp 137.096.000,00.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. Evaluasi SAKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka dilaksanakan evaluasi AKIP atau evaluasi implementasi SAKIP.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, didalamnya dinyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati/walikota.

Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, untuk memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri dari:

- 1) BPKP
- 2) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
- 3) Inspektorat Provinsi; dan
- 4) Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Inspektorat kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

3. Indek Persepsi Anti Korupsi

Indek Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan instrument pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di lingkungan di Indonesia. Penilaian IPAK merupakan salah satu upaya pembangunan Zona Integritas. Nilai Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Kebumen diperoleh dari Survey Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kemenpan dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Untuk Kabupaten Kebumen telah dilakukan pembangunan Zona Integritas pada seluruh perangkat daerah, namun baru ada 1 Perangkat daerah yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM, yaitu DPMPPTSP. Ke depan pembangunan Zona Integritas juga diimplementasikan ke seluruh Perangkat Daerah. Dalam hal penguatan pengawasan di Kabupaten Kebumen telah dilakukan upaya pencegahan korupsi yaitu pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP), merupakan sebuah program pencegahan korupsi yang dinilai oleh Komisi Pencegahan Korupsi (KPK). Hasil Penilaian MCP Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebesar 92,13. Nilai ini mengandung beberapa unsur nilai :

- Perencanaan dan Penganggaran APBD : 99
- Pengadaan Barang dan Jasa : 95
- Perizinan : 74
- Pengawasan APIP : 89
- Manajemen ASN : 85
- Optimalisasi Pajak Daerah : 91
- Pengelolaan BMD : 98
- Tata Kelola Desa : 100

Selanjutnya, tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Itjen Kemendagri pada Renstra adalah “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah”.

Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026 adalah “meningkatkan kualitas pengawasan yang terintegrasi”. Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu “meningkatnya

pengelolaan manajemen risiko pemda dan meningkatnya peran pengawasan internal”.

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sejalan dengan misi Bupati Kebumen serta menjadi pedoman untuk perumusan strategi. Namun demikian, berdasarkan analisis pada penentuan faktor kunci keberhasilan dapat ditetapkan tujuan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi Bupati serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi.

Sebagaimana diketahui ada beberapa tujuan dari visi-misi Kepala Daerah terpilih. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah perangkat daerah adalah tujuan dari misi kesatu yaitu; “terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan indikator Indek Reformasi Birokrasi. Adapun tujuan dari Inspektorat Daerah adalah mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, dengan indikatornya yakni Nilai SAKIP. Kemudian, sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah.

Dalam konteks reformasi birokrasi terdapat perubahan roadmap reformasi birokrasi. Pada tahun sebelumnya reformasi birokrasi berfokus pada 8 area perubahan, namun mulai Tahun 2023 reformasi birokrasi diarahkan pada reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. Reformasi Birokrasi tematik berfokus pada 5 sasaran, yaitu penurunan kemiskinan, indeks transformasi digital (khusus stunting), peningkatan realisasi investasi, penanganan laju inflasi dan tingkat penggunaan produk dalam negeri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen berkontribusi dengan mewujudkan sistem pengawasan intern yang mampu memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun indikator urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang diampu oleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan di atas. Sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya pengawasan internal Pemerintahan Daerah, dengan indikator Maturitas SPIP.

Tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tujuan/Sasaran Tahun ke-	
				2025	2026
1.	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel		Nilai SAKIP	74	77
		Meningkatnya pengawasan internal Pemerintahan daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,40	3.50

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Urusan

No	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Target Tahun ke-	
			2025	2026
1	Maturitas SPIP	Nilai	3,40	3,50

C. Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Bupati Kebumen periode Tahun 2021 – 2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Bersama Rakyat”.

Untuk melaksanakan visi tersebut, maka dilaksanakan 5 misi yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegritas
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan argo bisnis dan ekonomi kerakyatan
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermatahat

Berdasarkan visi misi tersebut, misi pertama selaras dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, maka Inspektorat Daerah Kebumen melaksanakan program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program kerja yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Tahun 2024 sesuai kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan terdiri dari 3 program dan 11 kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 kegiatan, yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pengkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terdiri dari 2 kegiatan :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - b. Pendampingan dan Asistensi

Dari 3 Program dan 11 Kegiatan terdapat program dan kegiatan yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu dan ada yang tersebar ke berbagai kawasan.

Daftar program dan kegiatan yang terfokus pada kawasan dan yang tersebar pada berbagai kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan 3.4

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan yang terfokus pada kawasan tertentu

No	Program	Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aparat Inspektorat Daerah Kab. Kebumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Aparat Inspektorat Daerah Kab. Kebumen
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aparat Inspektorat Daerah Kab. Kebumen
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aparat Inspektorat Daerah Kab. Kebumen
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aparat Inspektorat Daerah Kab. Kebumen
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aparat Inspektorat Daerah Kab. Kebumen
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aparat Inspektorat Daerah Kab. Kebumen

No	Program	Kegiatan	Kelompok Sasaran
2	Program Perumusan Kebijakan dan Pendampingan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Aparat Inspektorat Daerah Kab. Kebumen
		Pendampingan dan Asistensi	Perangkat Daerah

Tabel 3.4

Program dan Kegiatan yang tersebar ke berbagai kawasan

No	Program	Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Perangkat Daerah, Desa, BUMD
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Perangkat Daerah, Desa, Pegawai dan Masyarakat terkait

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Rencana kerja dan pendanaan mengacu kepada renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan pagu indikatif untuk Tahun 2025 sebesar Rp.10.329.278.493,00 dan Tahun 2026 sebesar Rp.14.272.403.000,00. Anggaran tersebut akan diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) program. Secara umum kerangka pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Kerangka Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

No	Program	Indikator Program	Tahun 2025		Prakiraan maju 2026	
			Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan PD	100%	8.937.278.493	100%	10.460.652.000
2.	Program penyelenggaraan pengawasan	Level Kapabilitas APIP	3	1.003.000.000	3	2.502.963.000
3.	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Nilai Persepsi Korupsi	3,50	389.000.000	3,50	1.308.788.000
	JUMLAH			10.329.278.493		14.272.403.000

Adapun daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dan anggaran Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel 4.2

Tabel 4.2

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Maturitas SPIP	3,40	10.329.278.493
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	8.937.278.493

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
6.01.01. 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	45.118.000
6.01.01. 2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	32.000.000
6.01.01. 2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	13.118.000
6.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	8.197.528.493
6.01.01. 2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	8.183.528.493
6.01.01. 2.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	52 Dokumen	14.000.000
6.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Orang	67.904.000
6.01.01. 2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	67.904.000
6.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	149.500.000
6.01.01. 2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000
6.01.01. 2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000
6.01.01. 2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	2 Paket	9.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
6.01.01. 2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3.500.000
6.01.01. 2.06. 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	16.000.000
6.01.01. 2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	90.000.000
6.01.01. 2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4.000.000
6.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 Unit	140.000.000
6.01.01. 2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	20.000.000
6.01.01. 2.07. 0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	80.000.000
6.01.01. 2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	40.000.000
6.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	175.132.000
6.01.01. 2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	3.000.000
6.01.01. 2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	122.132.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
6.01.01. 2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	50.000.000
6.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	58 Unit	162.096.000
6.01.01. 2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit	137.096.000
6.01.01. 2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit	25.000.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Leveling APIP	3	1.003.000.000
6.01.02. 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	149 Laporan	818.000.000
6.01.02. 2.01. 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	90.000.000
6.01.02. 2.01. 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	24 Laporan	210.000.000
6.01.02. 2.01. 0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	50.000.000
6.01.02. 2.01. 0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan	60.000.000
6.01.02. 2.01. 0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	70 Laporan	250.000.000
6.01.02. 2.01. 0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	98.000.000
6.01.02. 2.01. 0007	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	60.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
6.01.02. 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	33 Laporan	185.000.000
6.01.02. 2.02. 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang di tangani	3 Laporan	65.000.000
6.01.02. 2.02. 0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	120.000.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Persepsi Korupsi	3.45	389.000.000
6.01.03. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	5 Dokumen	26.000.000
6.01.03. 2.01. 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	2 Rekomen- dasi	13.000.000
6.01.03. 2.01. 0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan teknis dibidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	3 Rekomen- dasi	13.000.000
6.01.03. 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	24 OPD	363.000.000
6.01.03. 2.02. 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	24 Perangkat Daerah	53.000.000
6.01.03. 2.02. 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	13 Perangkat Daerah	60.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
6.01.03. 2.02. 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	180.000.000
6.01.03. 2.02. 0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7 Perangkat Daerah	70.000.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

**BAB V
PENUTUP**

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan Tahun 2025.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun 2025, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan target kinerja masing-masing sub kegiatan dan kegiatan.
- b. Untuk pengadaan barang/jasa agar dilaksanakan sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Melaksanakan keputusan Bupati Kebumen tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Daerah Tahun 2025
3. Mematuhi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Keputusan Bupati Kebumen terkait
4. Mematuhi peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa;
5. Mematuhi dan melaksanakan aturan/perintah dari pimpinan.

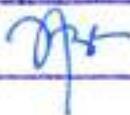
Apabila diperlukan Rencana Kerja ini akan dilakukan perbaikan.

Kebumen, 11 Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda
NIP.197207231998031006

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Junito P	
Hantari Mattedewi, SP	

LAMPIRAN

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. KEBUMEN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						10.329.278.493,00							14.272.403.000,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						10.329.278.493,00							14.272.403.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						10.329.278.493,00							14.272.403.000,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	8.937.278.493,00						-	10.460.652.000,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			10 Dokumen	45.118.000,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	-	50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				55 Orang/bulan	8.183.528.493,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		9.460.159.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				52 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		22.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			4 Orang	67.904.000,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	-	260.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	67.904.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		260.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	149.500.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	-	260.493.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				5 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				3 Paket	16.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				20 Laporan	90.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		130.493.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				4 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		0,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 Bulan	175.132.000,00			-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	-	208.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	122.132.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		73.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</i>	-			58 Unit	162.096.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	-	170.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				24 Unit	137.096.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		130.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				34 Unit	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	<i>Level Kapabilitas APIP</i>	-			3 Level	1.003.000.000,00						-	2.502.963.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<i>Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	-			149 Laporan	818.000.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	-	2.109.581.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				8 Laporan	90.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		207.618.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				24 Laporan	210.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		622.854.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>				5 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		175.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>				37 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		170.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa</i>				70 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		650.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>				1 Kesepakatan	98.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		163.909.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>				3 Laporan	65.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait		120.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>				30 Laporan	120.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait		273.182.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Nilai Persepsi Korupsi</i>	-			3,50 nilai	389.000.000,00						-	1.308.788.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	-			5 Dokumen	26.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen	-	53.743.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>				2 Rekomendasi	13.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		28.138.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>				3 Rekomendasi	13.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		25.605.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Jumlah Pendampingan dan Asistensi</i>	-			24 OPD	363.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah	-	1.255.045.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>				24 perangkat daerah	53.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah		109.273.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>				13 perangkat daerah	60.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah		53.045.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				8 Kegiatan	180.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah		601.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas															
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>				7 perangkat daerah	70.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 1. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memb erikan pelayanan publik yang berkualitas	Perangkat Daerah		491.727.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
J U M L A H								10.329.278.493,00								14.272.403.000,00	

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024

Jam : Pukul 13.00 WIB

Tempat : Aula Integritas Inspektorat Daerah Kabupaten
Kebumen

Forum Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

MENYEPAKATI

- KESATU** : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen;
- KEDUA** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.
- KETIGA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 22 Februari 2024

Pimpinan Sidang
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 197207231998031006

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	-	DPRD Kabupaten Kebumen	Jalan Merdeka No.6 Kebumen	
2.	Cahyo Ngadmanto, S.H.	Unsur Perangkat Daerah (Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BAPPEDA Kabupaten Kebumen)	Jalan Merdeka No. 2 Gedung F Kompleks Setda Kabupaten Kebumen	
3.	Elis Joko Widodo, S.H.	Unsur Kecamatan (Sekretaris Kecamatan Karanganyar)	Jalan Kartini No. 37 Karanganyar	
4.	Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si.	Unsur Lembaga (Dosen Universitas Putra Bangsa)	Jalan Ronggowarsito No. 18 Pejagoan	
5.	Eti Rochanah, S.Pd.	Unsur Masyarakat/LSM (LSM Formasi)	Desa Podoluhur Kec. Klirong	

Delegasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen
Pada Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si.	Universitas Putra Bangsa	Jalan Ronggowarsito No. 18 Pejagoan	

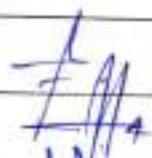
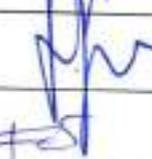
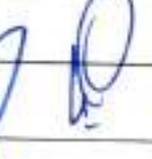
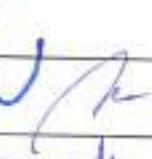
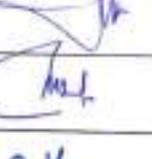
Lampiran I : BERITA ACARA KESEPAKATAN
 HASIL FORUM PD
 NOMOR :
 TANGGAL : 22 Februari 2024

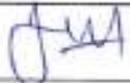
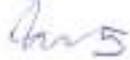
DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
 PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN : KEBUMEN
 TANGGAL : 22 Februari 2024
 TEMPAT : Aula Integritas Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
1	Oede Sukra Dana, S.Tr.K. M.H.	Polres Kebumen	Kebumen / 087863283375	
2	Romdhon Ekal	Polres Kebumen	Sruweng / 081331470211	
3	Neni Sri R	Dinkes PPKB	Jl Bumidiriyo	
4	Axellyn Setyananda P.	Forum Analis Kabupaten	Kebumen / 089539190588	
5	ARIF DANA P	PT. WIKALIO FARMA	Kebumen	
6	DWI / SIMORO	ITDA	Jl Arulybinang	
7	Ulmi H.	Diperkerasling	Kb.	
8	ANF	AP	P.H	
9	M. Fatmawati	Bag. Hukum	Kb.	
10	Ismiatul K.	KATU Pkm Pajajaran	Pajajaran / 081328709669	
11	Seha Rahayu	Dinas P3A	Soeta 153 / 08968737600	
12	Inded D	Cades Logedl bogede		
13	Sobirin	REFSA PRGPT	TJPRJP 087737982020	
14	Iyo Rafiqol	DHKP	Kebumen	
15	Zumaroh	kec. Kebumen	Kebumen	

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
16	Endra W	BPKPD	Kbm	
17	M. Afif Aldi	Bay. Organisasi	Wbm	
18	Elis jobs vindaels	Kel. KP. Mestek		
19	Nurkhotimah	PS DS	Kbm	
20	Sumarwan	Kecamatan	Kan.	
21	Dr. Fery L.T.	Instansi Kehula-ii	Kebum	
22	Sri Nuryani	BKPSDM	Kbm	
23	Achmad Syarifudin, S.P.	CIPB	Lebm	
24	Cahyo Nugroho	Bappep.	Kebumen.	
25	Kusuma H	BPR-Bek Kbm	Kbm	
26	Nila	Dinas PMD	Kbm	
27	Triqun Subangto	Satpol PP	Kbm	
28	AGUS RIANTO	ITDA	---	
29	KURNIA NADI	DPUPR	kbn	
30	ANIT	KABOS	Ku	
31	SUGHO EP.	BUPARBUP	Kb	
32	M. Ar Sri Widastuti	Disdikpora	lebm	
33	Nouri Andiyata	PDS	Ubm	
34	Ani ti Bayu	Batayun	Kb	
35	Eti Rochanas	Formasi	Kebumen	
36	E Ti	Inspektant	Kebumen	
37	Nur Utami	"	Kebumen	

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
38	Haryanso	Disdukcapil	0817200932	
39	Hanna W	ITDA		
40	Ibnu Syafiq	ITDA		
41	Masitah W	-		
42	Apri	APIP	kerayon	
43	Wazinda	APIP		
44	Bern Setiawan	Itda	Kebumen	
45	Hari Suryono	ITDA		
46	Rosidah	Itda	Kebumen	
47	MUH. ARIFIN	ASISTEN 3		
48	Akhmad. J	Itda	Kebumen	
49	Parsito			
50	Amry M	ITDA	KBM	
51	Kus Haryati	ITDA	Kebumen	
52	Amin R	Inspolektur	Kebumen	
53	Riski	Itda	Kebumen	
54	Wasito	Itda	Kebumen	
55	Budi	Itda	Kebumen	
56	Pesi	ITDA	Kebumen	
57	AdriL	ITDA	Kebumen	
58	Sri Ngatmini	ITDA	Kebumen	
59	ALFIAN	ITDA	Kebumen	

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	ALAMAT DAN NO TELEPON	TANDA TANGAN
60	Firdaus Akhari	ITDA	Kebumen	
61	Teguh	Pidmubukta		
62	Eni Samudra	-	Kebumen	
63	Tia Endang P	Pa Dta	Kebumen	
64	Panuty Nayanti	Hda Kebumen	Kebumen	
65				

Kebumen, 22 Februari 2024
 Inspektur Daerah
 Kabupaten Kebumen



Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197207231998031006

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program		Indikator Kinerja		Lokasi/ Output/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Kelembagaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)			Target	Kelembagaan/ Dana/ Page Indikatif (Rp.)		
6	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Maturitas RFP						10.303.146.493			14.272.403.000
6 01 01	PROGRAM URUSAN/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH	Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						8.911.146.493			10.450.652.000
6 01 01 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						45.118.000			50.000.000
6 01 01 2 01	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	6 Dokumen	Kab. Kebumen, Kabupaten, Kabupaten		22.000.000			25.000.000
6 01 01 2 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	4 Laporan	Kab. Kebumen, Kabupaten, Kabupaten		33.118.000			25.000.000
6 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Anggaran	100%	55 Orang/ Bulan	Kab. Kebumen, Kabupaten, Kabupaten		8.197.528.493			9.482.169.000
6 01 01 2 01	Penyediaan Daji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12 Bulan	Kab. Kebumen, Kabupaten, Kabupaten		8.183.528.493			9.463.159.000
6 01 01 2 03	Prosedur dan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Kelengkapan SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen penyediaan dan pengujian/verifikasi kelengkapan SKPD	100%	52 Dokumen	Kab. Kebumen, Kabupaten, Kabupaten		14.000.000			22.000.000
6 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							50.000.000			250.000.000

6.01.01.2.05.09	Pembelian dan Pelaksanaan Kegiatan Berencana Tugas dan Fungsi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Berencana Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	100%	3 Orang	3 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	260.000.000
6.01.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah								145.500.000				260.493.000
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Kebutuhan Sarana/Latih/Peningkatan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komposisi Instalasi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	100%	1 Paket	12 Bulan	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25.000.000
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Diperlukan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	100%	12 Paket	12 Bulan	12.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20.000.000
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bawang Cetak dan Penggantian Pengandaian	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bawang dan Cetak dan Pengandaian Yang Diperlukan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	100%	2 Paket	12 Bulan	9.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20.000.000
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bawang dan Perawatan Peralatan Ulangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bawang dan Perawatan Peralatan Ulangan yang disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	100%	5 Dokumen	12 Bulan	3.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.000.000
6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan Material	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Diperlukan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	100%	3 Paket	12 Bulan	16.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	40.000.000
6.01.01.2.06.09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	100%	20 Laporan	12 Bulan	90.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	130.403.000
6.01.01.2.06.10	Penyediaan Arup Dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Dinas pada SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	100%	4 Dokumen	12 Bulan	4.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	15.000.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								140.000.000				30.000.000

6	01	01	3.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	100%	24 Unit	30 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	30.000.000
6	01	01	3.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	100%	5 Unit	30 Unit	80.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0
6	01	01	3.08	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barista dan Prasarama Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	100%	1 Unit	30 Unit	40.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0
6	01	01	3.09	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							164.000.000				206.000.000	
6	01	01	3.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	100%	12 bulan	12 bulan	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	15.000.000
6	01	01	3.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	100%	12 Laporan	12 bulan	112.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	120.000.000
6	01	01	3.09	04	Penyediaan Jasa Peningkatan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peningkatan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	100%	12 Laporan	12 bulan	50.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	73.000.000
6	01	01	3.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah					165.000.000				176.000.000	
6	01	01	3.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Kendaraan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperlukan dan Dibayarkan Tidak dan Pedatuannya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	100%	24 Unit	58 Unit	140.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	138.000.000

5	01	01	3,00	06	Pembayaran Perbaikan dan Merah Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perbaikan dan Merah Lainnya yang Diperbaiki	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	100%	34 Unit	30 Upr	25.000.000	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum	Catatan Pelanggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	40.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERGAJARAN																	
6	01	02			Pengembangan Kinerja Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas APSP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	3 Nilai	8 Laporan	175 Ochrk	90.000.000	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum	Level Kapabilitas APSP	3 Nilai	2.109.581.000
6	01	02	2.01	01	Pengembangan Kinerja Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas APSP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	3 Nilai	24 Laporan	175 Ochrk	2.10.000.000	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum	Level Kapabilitas APSP	3 Nilai	622.854.000
6	01	02	2.01	03	Berita Laporan Kinerja	Level Kapabilitas APSP	Jumlah Laporan Hasil Berita Laporan Kinerja	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	3 Nilai	3 Laporan	175 Ochrk	90.000.000	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum	Level Kapabilitas APSP	3 Nilai	175.000.000
6	01	02	2.01	04	Berita Laporan Keuangan	Level Kapabilitas APSP	Jumlah Laporan Hasil Berita Laporan Keuangan	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	3 Nilai	37 Laporan	175 Ochrk	60.000.000	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum	Level Kapabilitas APSP	3 Nilai	170.000.000
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Level Kapabilitas APSP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	3 Nilai	70 Laporan	175 Ochrk	250.000.000	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum	Level Kapabilitas APSP	3 Nilai	650.000.000
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pemerintahan Internal	Level Kapabilitas APSP	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang Terhentikan	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	3 Nilai	1 Kerjasama	175 Ochrk	90.000.000	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum	Level Kapabilitas APSP	3 Nilai	163.000.000
6	01	02	2.01	06	Monevring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Level Kapabilitas APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monevring dan Evaluasi Tindak Lanjut pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	3 Nilai	4 Dokumen	175 Ochrk	60.000.000	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum	Level Kapabilitas APSP	3 Nilai	120.000.000

6.01.02	2.02	Penyenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelidikan Korupsi Negara/Daerah	Jumlah Penyelidikan Korupsi Negara/Daerah	Jumlah Penyeterajuan Pengawasan Internal	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	3. Nilai	3 Laporan	33 Ombak	1.85.000.000	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Kapabilitas APSP	3 Nilai	393.382.000
5.01.02	2.02.01	Peningkatan Penyelidikan Korupsi Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelidikan Korupsi Negara/Daerah	Jumlah Penyelidikan Korupsi Negara/Daerah	Jumlah Penyeterajuan Pengawasan Internal	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	3. Nilai	3 Laporan	33 Ombak	1.85.000.000	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Kapabilitas APSP	3 Nilai	393.382.000
6.01.02	2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelidikan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyeterajuan Pengawasan Internal	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	3. Nilai	30 Laporan	33 Ombak	120.000.000	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Level Kapabilitas APSP	3 Nilai	273.182.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDINGINGAN DAN ASISTENSI															
5.01.03	2.03	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Ditawarkan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Ditawarkan	Jumlah Perencanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	3,45 Nilai	3 Rekomendasi	5 Dokumen	360.000.000	36.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Persepsi Antikorupsi	3,5	83.743.000
6.01.03	2.03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perencanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	3,45 Nilai	3 Rekomendasi	5 Dokumen	360.000.000	36.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Persepsi Antikorupsi	3,5	83.743.000
6.01.03	2.03.02	Pendingingan dan Asistensi	Jumlah Pengantar Daerah yang Dibagikan dan Pendampingan dan Pemantauan Daerah	Jumlah Pengantar Daerah yang Dibagikan dan Pendampingan dan Pemantauan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	3,45 Nilai	24 Pengantar Daerah	24 OPD	343.000.000	53.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Persepsi Antikorupsi	3,5 Nilai	1.255.045.000
6.01.03	2.03.01	Pendingingan dan Asistensi Urutab	Jumlah Pengantar Daerah yang Dibagikan dan Pendampingan dan Pemantauan Daerah	Jumlah Pengantar Daerah yang Dibagikan dan Pendampingan dan Pemantauan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	3,45 Nilai	24 Pengantar Daerah	24 OPD	343.000.000	53.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Persepsi Antikorupsi	3,5 Nilai	1.255.045.000
6.01.03	2.03.02	Pendingingan dan Asistensi	Jumlah Pengantar Daerah yang Dibagikan dan Pendampingan dan Pemantauan Daerah	Jumlah Pengantar Daerah yang Dibagikan dan Pendampingan dan Pemantauan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	3,45 Nilai	24 Pengantar Daerah	24 OPD	343.000.000	53.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Persepsi Antikorupsi	3,5 Nilai	1.255.045.000
6.01.03	2.03.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	3,45 Nilai	6 Kegiatan	24 OPD	190.000.000	190.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Persepsi Antikorupsi	3,5 Nilai	601.000.000

6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengadaan Program	Milai Percepatan Arahkan-upai	Jumlah Peringkat Daerah yang Didukung Peningkatan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Integrasi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	Kab. Kebumaha, Kebumaha, Kebumaha	2.45 Miliar	7 Peringkat Daerah	24 OPD	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Milai Percepatan Arahkan-upai	3,8 Miliar	491.727.000
TOTAL													30.303.146.493	14.272.403.000			

Kebumaha, 22 Februari 2024
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMAH



AMIN SAHMANI KRASJED, S.H., M.H.
 Kepala
 Kabupaten Kebumaha Muda
 NIP. 197206221998031006

Lampiran III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
 FORUM PERANGKAT DAERAH
 NOMOR :
 TANGGAL : 22 Februari 2024

Usulan Bantuan Provinsi Jawa Tengah Sektoral Kabupaten Kebumen Tahun 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No	Perangkat Daerah Tujuan	Usulan Kegiatan	Keluasan		Lokasi	Lokasi Detail	APBD Provinsi (Rp)	Keterangan	
			Uraian	Volume					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			NIHIL						


 INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN
 AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda - IV/c
 NIP.197207231998031006

Lampiran IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN
 HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
 NOMOR :
 TANGGAL : 22 Februari 2024

Usulan Bantuan Provinsi Jawa Tengah Bantuan Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten/Kota (Daerah)	Jenis Kegiatan	Khusus Bantuan Sarpras dan Pendidikan		Permasalahan	Usulan Kegiatan	Sasaran		Keuangan		Lokas	Usulan Anggaran			Keterangan	
					Jenis Bangunan	Jenis Sub Elemen			Uraian	Volume	Uraian	Volume		AFSD Provinsi (Rp)	APB D (Rp)	Jumlah (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

NIHIL

INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN

 AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda- IV / c
 NIP. 197207231998031006

Lampiran V : BERITA ACARA KESEPAKATAN
 HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
 NOMOR :
 TANGGAL : 22 Februari 2024

DAFTAR USULAN KEGIATAN BERSUMBER DANA APBN (DAK DAN TP) DAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI
 PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No	Pengusul	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Bidang	Sub Bidang	Kementerian	Men	Kewenangan	Jenis	Pelaksanaan	Rincian	Detail Rincian	Prioritas	Penggunaan	Satuan	Volume	Unit	Nilai Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

NIHIL



Lampiran VI : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT DAERAH
NOMOR :
TANGGAL : 22 Februari 2024

Usulan APBN Non DAK Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Kementerian	Program	Kegiatan	Output	Satuan Output	Usulan	Total Usulan Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
			NIHIL				

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP.197207231998031006

Lampiran VII : BERITA ACARA KESEPAKATAN
 HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
 NOMOR :
 TANGGAL : 22 Februari 2024

Tabel Rumusan Usulan Program/Kegiatan
 Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kabupaten Kebumen

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					NIHIL							


 INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN
 AMIN RAHMAN NUBRASJID, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda- IV/c
 NIP. 197207231998031006

Lampiran VIII : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
NOMOR :
TANGGAL : 22 Februari 2024

Tabel Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Validasi terhadap usulan kegiatan DAPAT

No	Urusan	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume	Lokasi	Validasi	Catatan Validasi Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	9	10
				NIHIL				

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



AMIN RAMANURRAJID, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda- IV/c
NIP.197207231998031006

Lampiran IX : BERITA ACARA KESEPAKATAN
 HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
 NOMOR :
 TANGGAL : 22 Februari 2024

DAFTAR USULAN KEGIATAN LINTAS OPD/LINTAS WILAYAH
 PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target Kinerja	Tolok Ukur	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

NIHIL

INSPEKTUR DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN



AMIN RAHMANI RRASJID, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda - IV/c
 NIP.197207231998031006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381437, 381319 Faksimile (0287) 381319

Laman inspektorat.kebumenkab.go.id Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

NOTULA

- Sidang /Rapat : Forum Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen
- Hari/tanggal : Kamis/ 22 Februari 2024
- Surat Undangan : Nomor: 005/151 tanggal 15 Februari 2024
- Waktu Sidang/Rapat : Pukul 13.00 WIB sampai selesai
- Acara : 1. Pembukaan
2. Sidang Pleno
3. Diskusi
4. Pemilihan Delegasi Inspektorat Daerah pada Forum Perangkat Daerah
5. Penandatanganan Berita Acara Forum Perangkat Daerah
- Pimpinan Sidang : Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
- Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kab Kebumen
- Pencatat : Pengelola Bahan Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kab Kebumen
- Peserta Rapat : a. Perangkat Daerah terkait
b. Unit Pengendalian Pungutan Liar Kabupaten Kebumen
c. Unsur kecamatan
d. Unsur perguruan tinggi
e. Perwakilan desa
f. Forum Anak
g. Para Irban, Kasubag, Perencanaan, dan Panitia Forum Perangkat Daerah
- Kegiatan sidang/rapat : 1. Paparan materi oleh Narasumber
a. Asisten Administrasi Umum Sekda menyampaikan kegiatan apapun, walaupun anggaran kecil tetap dilaksanakan pengawasan

- b. Kabid PPM BAPPEDA Kabupaten Kebumen menyampaikan prioritas Pembangunan tahun 2025, antara lain untuk percepatan penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik.
 - c. Kasi pada Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Kebumen menyampaikan tentang arah kebijakan belanja daerah, antara lain memprioritaskan pada aspek layanan dasar, pemenuhan target RPJMD, infrastuktur, peningkatan kapasitas pengawasan dan peningkatan kualitas perencanaan.
 - d. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan tugas dan fungsi pokok Inspektorat Daerah, capaian IKU, program dan kegiatan yang di usulkan di tahun 2025 serta permasalahan yang dihadapi, antara lain dalam pemenuhan Kapabilitas APIP dan MCP, yang indikatornya belum terpenuhi, yaitu anggaran pembinaan dan pengawasan yang belum 0,5% APBD, Jumlah jam Pelajaran 120 jam per APIP per tahun, dan jumlah SDM
2. Diskusi (saran/masukan)
- a. Anggaran pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 baru mencapai 0,07% dari ketentuan 0,5% APBD Kabupaten Kebumen.
 - b. Manajemen Risiko di Kabupaten Kebumen agar dilaksanakan. Dalam pelaksanaan manajemen risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan pendampingan penyusunan risk register dan melaksanakan reviu manajemen risiko perangkat daerah
 - c. Pengawasan agar dilaksanakan mulai dari perencanaan bukan hanya saat pelaksanaan dan memberikan asistensi awal pada pemerintah desa.
Untuk pelaksanaan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah berbasis risiko, yang penyusunannya berdasarkan peta risiko perangkat daerah dan desa.

- d. Pada Polres Kebumen, Program Saber Pungli masuk prioritas tahun 2025. Mengingat anggaran Polres yang minim sekali untuk operasional saber pungli, diharapkan Inspektorat Daerah, perangkat daerah dapat memberikan dukungan maksimal.
- e. Keterbatasan anggaran, sumber daya, diharapkan memunculkan inovasi-inovasi

Pimpinan Sidang
Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen



Amin Rahmanurrasjid,SH,MH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19720723 199803 1006

DOKUMEN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025





